

**POLITIK BEBAS-AKTIF DALAM KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI AKHIR
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1963-1966**

Rizka Hanifah Febriana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang
Email: riskafebriana626@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pembahasan ini fokus mengkaji tentang politik bebas-aktif dalam gejolak konflik antara Indonesia-Malaysia yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Salah satu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dunia ternyata menimpa hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dengan Malaysia. Konflik ini terjadi karena Indonesia tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang mencakup wilayah perbatasan meliputi Malaya, Sabah, Serawak, Singapura dan Brunei. Indonesia yang berpengang pada politik luar negeri bebas-aktif memiliki posisi netral dalam menyikapi semua permasalahan secara internasional. Akan tetapi, sistem Demokrasi Terpimpin menitikberatkan keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Adapun keberadaan penelitian inilah yang bertujuan untuk mengungkap apakah gejolak konflik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dapat diselesaikan setelah berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin. Guna mengungkap fakta tersebut, diperlukan prosedur pengembangan pembahasan yang dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi serta berdasarkan pada data yang bersumber dari literatur bacaan dan kepustakaan. Penulis juga berusaha untuk menyajikan penggunaan interpretasi atau pemaknaan secara eksploratif. Hasil penelitian secara keseluruhan menjelaskan tentang renggangnya hubungan antara Indonesia-Malaysia yang diakibatkan oleh gejolak di wilayah perbatasan akibat pembentukan negara Federasi Malaysia. Sekaligus memanfaatkan politik luar negeri bebas-aktif sebagai basis penyelesaian konflik.

Kata Kunci: *Konflik, Indonesia-Malaysia, Demokrasi Terpimpin, Politik Bebas-Aktif*

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara deklaratif telah diakui oleh negara lain setelah proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Keadaan Indonesia pada saat itu belum sepenuhnya dikatakan stabil dari sisi politik, ekonomi maupun keamanannya. Sebagai negara yang telah merdeka secara *de facto* dan *de jure*, rakyat Indonesia harus senantiasa menjaga kedaulatan tersebut agar terhindar dari gangguan bangsa penjajah. Banyak permasalahan yang masih kerap timbul di masyarakat yang memerlukan kebijakan pemerintah dalam proses penanganan. Pemerintah kemudian membuat badan parlemen dan sistem ideologi yang bertujuan untuk mengatur masyarakat Indonesia. Hal tersebut kemudian diimplementasikan dari badan parlemen yang terdiri dari kabinet, menteri atau DPR serta dasar hukum negara

Pancasila dan undang-undang dasar yang sifatnya masih belum permanen.

Memasuki pertengahan abad ke-20, tepat satu tahun setelah proklamasi dikumandangkan, terjadi sebuah peristiwa revolusi sosial besar-besaran di Pulau Sumatera. Lebih spesifiknya pada masyarakat di Sumatera Timur melawan penguasa dari Kerajaan Melayu. Kejadian ini ditimbulkan oleh gerakan komunis yang berkeinginan menghapuskan sistem kerajaan dengan dalih menghilangkan sikap antifeodalisme. Gerakan sosial yang timbul pada masyarakat Sumatera Timur sebenarnya merupakan gerakan untuk menghapuskan tata nilai maupun norma yang kurang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Hak lahan atas penguasa lokal pada akhirnya harus tumpang tindih satu sama lain akibat banyaknya pembukaan wilayah hutan.

Sebagai negara yang belum merdeka dan pemerintahnya belum diakui oleh negara

lain, Malaysia mengambil keputusan untuk bersekutu dengan Inggris. Keputusan tersebut disetujui karena Inggris secara cuma-cuma akan memberikan kemerdekaan bagi negara Malaysia. Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan Inggris menjadi jauh lebih besar dengan membentuk Uni Malaya (Malaya Union) atau sering disebut juga dengan Federasi Negara Malaysia. Pembentukan Uni Malaya sendiri merupakan sebuah misi yang dilakukan untuk menggabungkan negara-negara Melayu, Penang, dan Malaka menjadi satu koloni dengan himbuan dari Inggris bahwa hal ini menjadi visi untuk mempercepat kemerdekaan Malaysia. Para pendatang dan majemuknya suku, ras, dan agama dari negara-negara bagian tersebut dijadikan alasan oleh Inggris untuk membuat kesepakatan konstitusional mengenai prinsip kewarganegaraan bahwa seluruh rakyat Malaysia itu setara.

Seiring berjalannya waktu ketika masa kepemimpinan Ir. Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin, timbul kembali permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara dua negara yang selalu dijuluki sebagai saudara sepanjang hayat ini. Konflik tersebut dinyatakan dapat mempengaruhi hubungan bilateral yang telah Indonesia dan Malaysia jalin. Permasalahan di wilayah perbatasan menjadi pemicu utama perpecahan di antara kedua negara dan Filipina yang juga menyuarakan hak milik wilayah negaranya. Konflik semakin memanas ketika Indonesia mengajukan konfrontasi kepada Malaysia karena Indonesia memiliki prinsip berpegang pada politik luar negeri bebas-aktif atau politik netral. Hubungan yang terjalin antara Malaysia dan Inggris menimbulkan kemarahan besar bagi Indonesia termasuk Ir. Soekarno yang antikolonialisme. Pernyataan tersebut didukung oleh argumen bahwa keberadaan Inggris di kawasan Asia Tenggara dianggap dapat membahayakan revolusi dan keutuhan sebuah negara.

Presiden Soekarno bahkan membentuk suatu badan operasi khusus bernama Operasi Dwikora. Dibentuknya Dwikora atau singkatan dari Dwi Komando Rakyat menjadi wujud perlawanan yang digencarkan oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Keberhasilan

Indonesia dalam gerakan Trikora semakin menambah kepercayaan dalam diri bangsa Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Bukan suatu bentuk gerakan untuk dijadikan alat untuk menumpas Malaysia melainkan untuk menghilangkan paham neokolonialisme Inggris. Bantuan dikerahkan dengan mengirimkan pasukan militer pertahanan dan sejumlah rakyat Indonesia sendiri untuk melindungi wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Selain itu, polarisasi dari dampak yang ditimbulkan selepas Perang Dingin membuat negara-negara yang baru mendeklarasikan kemerdekaannya bersama-sama saling merangkul untuk menghilangkan paham imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme dari bangsa Barat. Pada hakikatnya Indonesia memiliki kebijakan politik netral yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif sebagai prioritas utama menetralkan kembali kekuatan besar dengan tujuannya menciptakan perdamaian dunia. Sikap bebas aktif ini mendefinisikan bahwa Indonesia tidak condong kepada sayap kiri maupun sayap kanan. Oleh karena itu, apakah rencana Indonesia untuk mengganyang Malaysia menjadi bukti kenetralan Ir. Soekarno dan politik luar negeri bebas aktif dalam menyikap pengaruh kolonialisme Barat?

B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian sejarah. Tahapan ini merupakan suatu kumpulan yang tersusun secara sistematis dalam prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang sesuai dengan kaidah topik penulisan yang secara tidak langsung membantu mengumpulkan sumber dan bahan sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan, meliputi Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan tahap terakhir yakni Historiografi.

Heuristik atau pengumpulan sumber menjadi tahap dimana peneliti harus mengumpulkan data atau sumber sejarah yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu, Verifikasi atau kritik terhadap sumber merupakan langkah selanjutnya untuk memilah dan menguji sumber

data. Kritik terhadap data dilakukan untuk mempertanggung jawabkan kevalidan akan data yang didapatkan. Verifikasi atau kritik sumber menjadi tahapan yang sangat penting untuk dilakukan dalam metode penelitian sejarah. Metode selanjutnya yaitu Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber data yang menjelaskan suatu peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Interpretasi dibagi menjadi dua macam meliputi analisis atau penguaraian dan proses sintesis atau penyatuan terhadap berbagai sumber yang telah dikritik. Metode interpretasi dilakukan dengan tujuan menghasilkan sudut pandang yang realistis terhadap suatu peristiwa sejarah. Kemudian tahapan yang terakhir dengan menuliskan hasil interpretasi sekaligus kritik ke dalam bentuk historiografi sejarah. Rangkaian sebuah narasi dari data sumber yang memuat fakta menjadi akhir penelitian yang objektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN **Pembentukan Negara Federasi Malaysia**

Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Malaya merupakan negara-negara yang dibentuk di bawah kekuasaan Britania Raya. Sebelum Malaysia merdeka, ada hari dimana pada tahun 1946 Persekutuan Tanah Malaya terbentuk oleh badan bernama Uni Malaya. Namun, Uni Malaya kemudian digantikan dengan kedudukan Federasi Malaysia tepatnya pada 1 Februari 1948 yang mengantarkan pada kemerdekaan Malaysia pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 31 Agustus 1957. Pembentukan negara federasi ini pertama kali dipelopori oleh Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri yang sedang menjabat saat itu. Karena lebih condong pada paham Barat, sehingga dengan mudah ia menerima perjanjian yang diberikan oleh Inggris. Kemerdekaan yang diterima Malaysia dilalui tanpa proses pertumpahan darah.

Federasi ini menjadi perkumpulan dari 11 negara bagian meliputi Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Malaka, Perak, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Terengganu, dan Kelantan. Kemudian dua negara bagian lainnya meliputi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dengan ibu kota Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan Putrajaya dengan ibu kota

Putrajaya. Setelah pembentukan negara federasi ini berhasil dilaksanakan, diharapkan negara-negara tersebut juga dapat condong pada haluan Barat.

Akan tetapi, organisasi tersebut tidak bertahan lama karena digantikan dengan lahirnya sebuah perjanjian antara Malaysia dengan Inggris atau disebut dengan *Federation of Malaya Agreement*. Perjanjian ini sudah dirancang sejak tanggal 15 November 1961. Akan tetapi, baru dapat terlaksana pada 9 Juli 1963 di London, Britania Raya. Perjanjian ini sebenarnya berkaitan dengan kemerdekaan yang diberikan Inggris. Tidak dengan harga yang gratis, di dalam isi perjanjian tersebut terdapat undang-undang yang tertulis bahwa Inggris menginginkan bersatunya Kerajaan Britania Raya dengan Irlandia Utara, Federasi Malaya, Sarawak, Singapura dan Borneo Utara atau berganti nama menjadi wilayah Sabah.

Malaysia sebagai negara persemakmuran Inggris di dalam undang-undang sudah tertulis bahwa segala kehendak yang diinginkan oleh kekuasaan Britania Raya harus segera diserahkan oleh pihak Malaysia. Terdapat satu pasal di dalam undang-undang yang menyatakan bahwa Malaysia harus menyerahkan tanah wilayahnya untuk disewakan kepada Inggris dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan berlaku ketika Inggris akan membutuhkannya. Salah satu alasan Inggris menyewa tanah di negara persemakmurannya dengan tujuan dapat dengan mudah membuat pangkalan militer di luar wilayah negaranya.

Rencana tersebut ternyata tidak sejalan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, dua diantaranya yakni negara Filipina dan Indonesia. Filipina menentang keras pembentukan negara Federasi Malaysia karena wilayah Borneo Utara yang berganti nama menjadi wilayah Sabah secara historis merupakan daerah kekuasaan milik Kesultanan Sulu. Filipina mengklaim hal tersebut bukan tanpa sebab, karena Kesultanan Sulu merupakan sebuah pemerintahan Muslim yang pernah berkuasa di Laut Sulu yang letaknya di sekitar Filipina Selatan.

Penentangan yang Filipina lakukan bukan tanpa sebab belaka. Wilayah Sabah

sebenarnya hadiah pemberian dari Sultan Brunei sebagai bentuk rasa terima kasih telah membantu menumpas pemberontakan di negeri para sultan tersebut. Jauh sebelum Malaysia merdeka, wilayah Sabah sudah disewakan kepada *British North Borneo Company* atau perusahaan yang berada langsung di bawah kendali Inggris. Dalam kontrak yang telah disepakati bersama, perusahaan Inggris harus membayarkan sejumlah uang pajak senilai 1.600\$ USD atau setara dengan ± 24 Juta. Kontrak tersebut berakhir ketika Inggris sudah pergi meninggalkan tanah sewa tersebut.

Kemerdekaan Malaysia dan rencana pembentukan negara Federasi Malaysia oleh Inggris kemudian menciptakan sebuah sentimen. Sabah yang secara sepihak dimasukkan ke dalam bagian negara Federasi Malaysia berarti melanggar kontrak hak kepemilikan yang lebih dahulu dimiliki oleh Kesultanan Sulu. Walaupun pemerintah Malaysia selalu membayarkan pajak setiap tahunnya, tidak dapat merubah status kepemilikan Sabah karena secara kontrak Malaysia disebutkan hanya menyewa bukan mengalihkan kepemilikan wilayah tersebut.

Sementara pandangan yang dilihat oleh Indonesia khususnya oleh pemimpin negara, yakni Ir. Soekarno juga menunjukkan arti yang berbeda. Soekarno menganggap bahwa pembentukan negara federasi merupakan proyek neokolonialisme yang sedang digarap oleh Inggris. Hal tersebut tentunya dapat membahayakan Revolusi Indonesia dan negara-negara di lingkungan Asia Tenggara. Penolakan Indonesia terhadap pembentukan Negara Federasi Malaysia sebagian besar disuarakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pengaruh yang ditimbulkan begitu besar hingga Ir. Soekarno tanpa segan mengajukan konfrotasi kepada Malaysia.

Konfrotasi Indonesia-Malaysia Masa Demokrasi Terpimpin

Hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia dalam perjalanan sejarah tidak lepas dari hubungan persaudaraan yang erat. Fakta ini lebih terasa pada sistem kebahasaan yakni bahasa Melayu sebagai *lingua franca* atau bahasa penghubung

antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai hasil kebudayaan yang masih dipegang erat oleh kedua wilayah dengan kesamaan bentuk maupun penamaan khususnya di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, hubungan dari dua atau lebih negara yang berdekatan jauh lebih memiliki resiko yang tinggi bagi timbulnya sebuah konflik. Seperti sebutan persaudaraan hayat yang namanya sudah lekat bagi Indonesia dan Malaysia yang harus berakhir dengan pernyataan bahwa Indonesia akan mengganyang Negeri Jiran tersebut.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan alasan pemberian kemerdekaan yang ditawarkan oleh Inggris kepada Malaysia yang dianggap oleh Soekarno saat memerintah pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai bentuk praktik imperialisme dan kapitalisme secara tidak langsung. Ide milik Inggris digunakan untuk mempengaruhi Malaysia perihal memilih opsi yang menguntungkan. Namun, pada kenyataannya gagasan milik Inggris kemudian meruntuhkan benteng milik Malaysia yang awalnya tidak terpengaruh oleh kolonialisme dan menghilangkan kepercayaan pihak Indonesia. Lalu Malaysia dengan mudah mendeklarasikan kemerdekaan tersebut tanpa harus menumpas para pemberontak dalam perlawanan berdarah.

Perasaan cinta tanah air membuat Soekarno merancang sebuah rencana untuk menumpas aliran Barat tersebut agar Indonesia dan wilayah di kawasan Asia Tenggara tidak terkena dampak negatif dari neokolonialisme yang ada di negara Malaysia. Sejarah panjang telah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan tidaklah mudah. Peran penting dari Soekarno-Hatta telah mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan yang telah menjadi cita-cita bangsanya melahirkan paham anti-kolonialisme. Sepanjang memperbaiki kerusakan internal maupun eksternal dari bangsa dan negara, Soekarno telah menjadi aktor utama yang mendominasi elemen kehidupan di negeri Indonesia ini.

Konfrotasi yang diajukan Indonesia kepada Malaysia memunculkan rumor mengenai ambisi dalam diri Soekarno untuk menguasai wilayah teritorial yang masuk dalam

kebijakan luar negeri Indonesia. Kejayaan besar pada masa kerajaan Hindu-Budha memunculkan kepercayaan besar terkait wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang tidak hanya menguasai Nusantara melainkan hingga ke luar wilayah perbatasan.

Di mulai sejak Inggris dan Malaysia menyatakan membentuk Negara Federasi Malaysia, Indonesia sudah tidak sepeham dengan pemikiran tersebut. Saat itu juga di Indonesia sedang ada perjuangan rakyat Irian Barat yang sedang memanas akibat konflik politik antara Indonesia dengan Belanda. Ketika Revolusi Nasional Indonesia telah diakui oleh Belanda, klaim wilayah Irian Barat oleh Indonesia menjadi persoalan baru karena Belanda mengangaap wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate merupakan milik pemerintah kolonial. Guna mempertahankan kemerdekaan dan revolusi bangsa Indonesia, pada akhirnya Soekarno secara sepihak mengajukan konfrotasi kepada Malaysia. Konflik antar sesama negara di kawasan Asia Tenggara pada akhirnya pecah. Konflik ini memang tidak dilakukan dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan secara langsung, akan tetapi efek yang ditimbulkan sangatlah berpengaruh bagi keberadaan dua negara tersebut di mata dunia.

Dalam lingkup secara internasional, konflik ini sudah dalam tahap mulai mengundang perhatian para petinggi-petinggi negara. Puncaknya pada bulan November 1964, ketika konflik sedang berlangsung, Malaysia menjadi salah satu kadidat dalam pemilihan dewan keamanan tidak tetap PBB yang dimana kala itu Indonesia telah lebih dahulu masuk dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa jauh sebelum Malaysia. Secara spontan Indonesia yang diwakili oleh Soekarno menyatakan keluar dari PBB. Alasan kuat Indonesia untuk keluar dari PBB sebenarnya dilatar belakangi oleh diskriminasi sebagai sebuah negara berkembang. PBB juga dianggap melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama bahwasannya setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Indonesia yang memegang politik luar negeri netral menganggap bahwa PBB

telah menjadi alat politik Barat, khususnya bagi Inggris dan Amerika Serikat.

Kondisi yang semakin tidak terkendali dan bertambah geramnya Soekarno terhadap Malaysia menjadi ajang bagi PKI untuk memanfaatkan keadaan. Konfrotasi fisik semakin memanas dengan membaranya partai komunis tersebut dalam menyulutkan jargon-jargon ganyang Malaysia. Bahkan ketika Amerika Serikat memberika bantuan kepada Indonesia, Soekarno selaku pemimpin negara menolak pemberian tersebut. Sebelum mencapai klimaks di November 1964, pada bulan Mei sebuah pidato membahas perihal pembentukan Dwi Komado Rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan Dwikora oleh Ir. Soekarno.

Peran Operasi Dwikora dan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Dalam mewujudkan keberhasilan dalam konfrotasi kepada Malaysia, Indonesia mengerahkan seluruh pasukan hingga ke wilayah-wilayah perbatasan bahkan ada dari sebagian besar anggota militer diberikan tugas khusus untuk menjadi mata-mata atau melakukan spionase. Selain Operasi Dwikora, terdapat konsep yang dibentuk untuk memperkuat pertahanan, yakni dengan adanya KOLAGA atau singkatan dari Komando Mandala Siaga. Tujuan dibentuknya operasi ini sebenarnya untuk mempermudah mengirimkan pasukan-pasukan ke beberapa wilayah jajahan Inggris di Pulau Kalimantan.

Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan "Kami perintahkan kepada dua puluh satu juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri: perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia". Semangat kebangsaan yang dikumandangkan dalam pidatonya bertujuan untuk menghilangkan segala keraguan yang menggajal dalam diri bangsa Indonesia. Selain itu, operasi ini diharapkan mampu meredam semua persoalan konflik antara Indonesia-Malaysia sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman dan meminimalisir segala kemungkinan perlawanan bersenjata. Hal ini

senantiasa dapat meningkatkan sikap kewaspadaan dan kesiapsiagaan rakyat Indonesia dalam pelaksanaan perjuangan bangsa melalui Operasi Dwikora.

Di samping itu, Indonesia mengatur urusan politik eksternal dengan bantuan politik luar negeri yang bersifat bebas-aktif. Wakil presiden kala itu, Muhammad Hatta mengatakan bahwa politik luar negeri netral bukan berarti tidak melaksanakan perdamaian dunia. Justru melalui kesempatan tersebut, Indonesia menjadi badan penengah atau tidak memihak dari salah satu blok. Hal ini juga diseimbangi oleh rasa percaya diri dan komitmen dari sebuah negara yang baru saja merdeka. Politik netral ini menjadi sebuah politik yang dibentuk untuk tidak memihak pada satu kekuatan dunia karena negara secara aktif melakukan hubungan bilateral maupun multilateral dan melakukan kebijakan luar negeri sebagai bentuk respon negara yang baik dalam meredam permasalahan pada lingkup internasional. Politik luar negeri bebas-aktif berpedoman pada landasan yang mengedepankan dasar negara, Pancasila.

Pancasila sebagai landasan ideal memiliki arti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia maupun Pancasila sebagai dasar ideologi dan filosofi negara. Lahirnya Pancasila dilatar belakangi oleh suatu pemikiran yang digagas melalui sudut pandang kehidupan masyarakat, kebiasaan, dan beragam corak tradisi turun temurun suku serta bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila memuat arti pelaksanaan ideal yang dilakukan dalam politik luar negeri Indonesia.

Sebuah gagasan yang dilaksanakan oleh politik bebas-aktif telah banyak berpartisipasi dalam berbagai forum perdamaian dunia salah satunya penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Diplomasi berperan untuk dalam menyatukan dua hubungan pemerintahan melalui jalur persuasi atau bujukan halus dengan memberikan penawaran dan prospek yang baik bagi pelaksanaan kebijakan kedepannya atau negosiasi sebagai bentuk interaksi sosial dengan harapan mampu menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Kedua hal tersebut sama artinya dengan

keefektifitasannya politik luar negeri bebas aktif dalam memberikan pertimbangan atau saran disetiap permasalahan yang harus diselesaikan oleh masing-masing negara. Dengan demikian, prinsip yang konsisten dalam proses penyelesaian isu dari waktu ke waktu membutuhkan metode yang berbeda dan selalu berbeda. Hal tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengasah kreatifitas dalam menyikapi segala persoalan yang datang secara tidak terduga. Perannya dalam masa kini juga masih tetap sama untuk senantiasa konsisten menjalankan perdamaian dunia, fokus mewujudkan nasionalisme bangsa serta mampu menempatkan posisi yang sejajar dengan negara-negara lain sehingga konflik dapat terhindarkan.

D. SIMPULAN

Revolusi Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan bangsanya. Kekuatan untuk melawan penjajah dan segala bentuk pemecah belah di antara suku dan bangsa berasal dari kepercayaan rakyat Indonesia sendiri. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa terberat bagi Indonesia karena banyaknya konflik yang terjadi. Salah satunya hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia yang harus putus di tengah jalan. Pembentukan Negara Federasi Malaysia menjadi pemicu utama perpecahan tersebut. Sebagai saudara sepanjang hayat, Malaysia melanggar janji untuk tidak terpengaruh oleh ideologi Barat. Inggris memberikan jaminan kemerdekaan kepada Malaysia apabila membentuk negara federasi tersebut. Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya menolak keras keberadaan Inggris yang berkuasa di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menganggap kedatangan Inggris ke Malaysia merupakan bentuk neokolonialisme Barat yang dapat membahayakan revolusi dan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menjaga kedaulatan Indonesia, Presiden Soekarno kemudian menyatakan konfrontasi kepada Malaysia. Ia bahkan membentuk pasukan operasi khusus bernama Dwikora untuk menjaga revolusi dan membebaskan negara bagian bentukan Inggris dan Malaysia. Selain itu, peran besar politik luar negeri bebas aktif berhasil meredakan konflik

perbatasan Indonesia-Malaysia di akhir masa Demokrasi Terpimpin. Dengan begitu, peran menjaga perdamaian dunia berhasil dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrinus Siburian, & Faisyal Rani. 2013. Diplomasi Malaysia terhadap Kesultanan Sulu (Filipina) dalam *Perebutan Wilayah Sabah*. Hlm 1-10.

Irshanto, A. B. (2019). Dari Konfrotasi Menuju Perdamaian (Hubungan Indonesia-Malaysia 1963-1966). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 84-97.

Irshanto, A. B., Leli Yulfar, & Helius Sjamsuddin. 2020. Materi Konfrotasi Indonesia-Malaysia 1963-1966: Prespektif Buku Teks Sejarah Indonesia Malaysia. *Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies*, 2(1), 29-37.

J.A.C Mackie. 1974. *Confrotation the Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966* (ver *terjemah*). Oxford University Press.

Ling, C. W., & Raja, S. S. 2018. First Major Military Incursions in Sarawak, Sabah and Peninsular Malaysia During Indonesia-Malaysia Confrotation: Prespektive of Selected Malaysian English-Language Newspaper. *JATI-Journal of Southeast Asian Studies*, 23(2), 1-24.

Sunarta, R.V. 2014. *Dwikora 1964 "Ganyang Malaysia": Bukti Nyata Ketegasan, Keberanian, dan Nasionalisme Bangsa Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Lama*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.

Rina Kastori. 2022, November 4. *Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia Halaman all*. Kompas.com. Retrieved November 12, 2023, from <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/120000969/konfrontasi-indonesia-dengan-malaysia?page=all>

Subroto, L. H., & Ningsih, W. L. 2021, December 20. *Operasi Dwikora: Latar Belakang, Kronologi, dan Akhir Halaman all*. Kompas.com. Retrieved October 1, 2023, from <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/20/140000379/operasi-dwikora--latar-belakang-kronologi-dan-akhir?page=all>

Usman, A. 2023. Indonesia, Asia Tenggara dan Selatan. *Analisis CSIS*, (8), 678-686. Retrieved from <https://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/view/819>

Wasino., Hartatik, Endah S. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta.

Yadi Kusmayadi. 2017. Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrotasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966. *Jurnal Artefak: History and Education*, 4(1), 23-34.

Yulianto, Agus B. 2008. *Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Konfrotasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966 (Suatu Kajian Historis)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.